

# PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP IPM DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Marisa Br Sinuraya<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara

Jl. Sivas Akademi No. 9 Padang Bulan, Medan – Sumatera Utara – Indonesia – 20155

\*Korespondensi Penulis: [marisasinuraya23@gmail.com](mailto:marisasinuraya23@gmail.com)

**Abstract:** *This research was conducted in North Sumatra Province in 2010-2019. The research conducted uses secondary data and uses Eviews 7. The purpose of this study is to find out how much influence government spending (health and education), poverty, unemployment, and economic growth has on HDI. The results show that government spending (health and education), poverty, unemployment have a positive effect on HDI, while economic growth has no significant effect on HDI. Government expenditure variables (health and education), poverty, unemployment together have a significant effect on HDI.*

**Keywords:** *Economic Growth, Government Spending (Health and Education), HDI, Poverty, Unemployment*

## 1. PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (Ananta, 2013). Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan.

Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantaranya investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan yang diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Usmaliadanti, 2011). Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan searah adalah dengan lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya ketimpangan dan kesenjangan sosial akibat kebijakan yang lebih condong pada pertumbuhan ekonomi. Faktor lain yang dianggap penting dalam peningkatan IPM adalah dari segi tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kemiskinan merupakan salah satu aspek lain yang menggambarkan kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu prioritas pembangunan suatu negara, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan.

Pemerintah daerah di Indonesia sebagai penentu kebijakan memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya sebagai input pembangunan wilayah, khususnya setelah ditetapkannya Undang-undang no 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang no 32

tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dimana kebijakan pembangunan daerah diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya sebagai pengawas atau pengontrol kebijakan. Beberapa wilayah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai strategi pembangunannya, sementara beberapa wilayah lain memberikan perhatian relatif lebih besar terhadap kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas sosial dan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Keragaman sumberdaya, kapabilitas, kebutuhan, serta potensi di masing-masing wilayah memengaruhi strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perumusan kebijakan yang kurang tepat dapat mengurangi efisiensi dan efektifitas program kebijakan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Oleh sebab itu perlu dianalisis apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah (bidang kesehatan dan pendidikan), kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Sumatera Utara.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM adalah salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli/paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (UNDP).

### **Pengeluaran Pemerintah (Bidang Pendidikan dan Kesehatan)**

Belanja pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran, (Kuncoro, 2000). Apabila dilihat dari kelompok sasaran, ada terdapat beberapa tipe penggolongan kemiskinan. Penggolongan ini dimaksudkan agar setiap program dapat memiliki sasaran dan terget yang lebih jelas. Kemiskinan dibagi dalam tiga kategori, yaitu (Sumodiningrat, 2009) :

- a) Kemiskinan absolut adalah pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b) Kemiskinan relatif adalah situasi kemiskinan diatas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non miskin dalam suatu komunitas.
- c) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut.

## Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar (Todaro dan Smith, 2006). Menurut teori pertumbuhan modern, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal fisik (kapital) saja, tetapi juga dari produktivitas tenaga kerja yang berkaitan erat dengan peningkatan mutu modal manusia (Sukirno, 2006).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder, yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan empat variabel bebas yaitu Pengeluaran Pemerintah (Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan), Kemiskinan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), maupun sumber data sekunder lainnya. Data berupa data time series tahun 2010 hingga tahun 2019. Analisis data menggunakan model regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan (X1), Kemiskinan, Pengangguran (X3) dan Pertumbuhan Ekonomi (X4), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*).

Model umum dari analisis ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \quad (1)$$

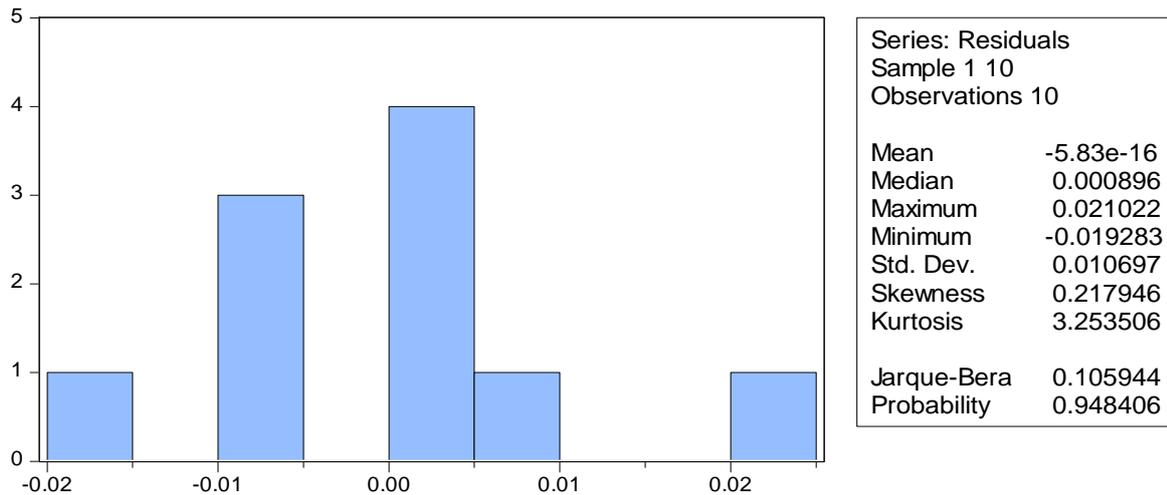
Keterangan:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia,
- X1 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan
- X2 = Kemiskinan,
- X3 = Pengangguran
- X4 = Pertumbuhan Ekonomi
- $\beta_0$  = Intersep
- $\beta_i$  = Koefisien variabel bebas
- $\varepsilon$  = Variabel gangguan

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah nilai residual dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian Normalitas menggunakan pendekatan Jarque-bera test (Uji JB). Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0,105944 dan memiliki probabilitas sebesar 0,948406 > 0,05 jadi dapat di simpulkan model ini sudah terdistribusi dengan normal.



**Gambar 1.** Hasil Uji Normalitas

Sumber: Dianalisis Penulis, 2020

### Multikolinearitas

Multikolinieritas dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat hubungan diantara variabel variabel bebas (independen). Uji terhadap multikolinieritas diperlukan mengingat dalam regresi berganda, variabel bebas yang baik adalah variabel bebas yang mempunyai hubungan dengan variabel terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya.

**Tabel 1.** Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.043361	2105.075	NA
X1	4.56E-14	246.9666	5.835335
X2	2.69E-15	13.42700	1.473601
X3	3.10E-14	248.4988	1.603427
X4	0.000277	436.9296	5.135563

Sumber: Dianalisis Penulis, 2020

Dari hasil tabel tersebut menunjukkan nilai centered VIF untuk X1, X2, X3 dan X4 masing-masing kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

### Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji Breusch-Pagan-Godfrey Adapun hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 2.** Hasil Uji heteroskedastisitas.

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Statistic	Value	Prob. F(4,5)	Prob. Chi-Square(4)
F-statistic	3.830145	0.0866	0.1100
Obs*R-squared	7.539440		0.1100
Scaled explained SS	2.123772		0.7130

Sumber: Dianalisis Penulis, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai prob. Chisquare (4) pada Obs\*R-squared yaitu sebesar 0,1100. Oleh karena nilai p value 0,1100 > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada gejala

heteroskedastisitas.

### Hasil Regresi

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan malakukan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dari persamaan yang diperoleh dari hasil analisis data adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.** Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	58.39803	0.208234	280.4445	0.0000
X1	3.04E-05	2.14E-07	142.1894	0.0000
X2	5.18E-07	5.19E-08	9.985066	0.0002
X3	2.18E-06	1.76E-07	12.39043	0.0001
X4	0.038730	0.016654	2.325640	0.0676
R-squared	0.999957	Mean dependent var	69.24000	
Adjusted R-squared	0.999922	S.D. dependent var	1.627090	
S.E. of regression	0.014352	Akaike info criterion	-5.342979	
Sum squared resid	0.001030	Schwarz criterion	-5.191686	
Log likelihood	31.71490	Hannan-Quinn criter.	-5.508947	
F-statistic	28916.92	Durbin-Watson stat	2.996807	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Dianalisis Penulis, 2020

### Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji signifikansi individu (uji t) dilakukan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas, yaitu pengeluaran pemerintah (bidang kesehatan dan pendidikan), tingkat kemiskinan, penganguan dan pertumbuhan ekonomi secara individu (parsial) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, yaitu indeks pembangunan manusia, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai probabilitas untuk X1= 0,0000 ; X2 = 0,0002 ; X3 = 0,0001 dimana nilia tersebut < 0,05 sehingga dapat disimpulkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, sedangkan nilai X4 = 0,0676 > 0,05 sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, dengan asumsi variabel lainnya di anggap konstan. Berdasarkan hasil uji regresi, nilai prob (F-Statistic) sebesar 0,00000 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan model maka diperoleh nilai koefisien determinasi R<sup>2</sup> = 0,999957, yang artinya, variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (kesehatan dan pendidikan), tingkat kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat, yaitu indeks pembangunan manusia sebesar 99 persen sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

### Pembahasan

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas SDM dan

peningkatan produktivitas kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi ini diharapkan akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Abdul Kadir (2016) yang menyatakan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya setiap peningkatan kemiskinan akan menurunkan persentase IPM di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ginting (2008) dan Mirza (2011).

Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia artinya pengangguran memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya setiap peningkatan pengangguran akan menurunkan persentase IPM di Sumatera Utara. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga IPM di suatu daerah justru juga mengalami peningkatan. Dimana semakin tinggi pendapatan nasional atau daerah maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) secara langsung sehingga pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan kesimpulan bahwa :

- a) Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM yang berarti peningkatan Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan IPM.
- b) Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM yang berarti peningkatan kemiskinan akan menurunkan tingkat IPM
- c) Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM yang berarti peningkatan pengangguran akan menurunkan tingkat IPM.
- d) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung mempengaruhi IPM.

### Saran

Untuk meningkatkan pembangunan manusia di Sumatra Utara, pemerintah harus memfasilitasi infrastruktur pendidikan, kesehatan dan bidang ekonomi, sehingga dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Sumatra Utara dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk memacu pertumbuhan ekonominya dengan memprioritaskan pelayanan prima dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya menurunkan kemiskinan dan pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baeti, Nur (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 85–98.

- Laisina, C., Masinambow, V., & Rompas, W. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap PDRB melalui IPM di Sulawesi Utara tahun 2002-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04), 193–208.
- Mirza, D. S. (2015). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 4(2), 102–113.
- Putra, N. E. (2013). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi Tahun 2011-2015. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Prasetyoningrum, A. K., Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. 6, 217–240.
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25.